

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A.D.M. Forte (ed), 1999, *Good Faith In Contract And Property*, Oregon: Hart Publishing.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- American Law Institute, 1979, *Restatement (Second) of Contracts*, Washington: American Law Institute Publications.
- Breett King, 2020, *Bank 4.0: Perbankan Dimana Saja dan Kapan Saja, Tidak Perlu di Bank Transaksi Elektronik*, diterjemahkan oleh Indriani Grantika, Jakarta: Mahaka Publishing.
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*. West Publishing.Co, USA.
- David Slawson, 1996, *Binding Promises, The Late 20th-Century Reformation of Contract Law*, Princeton University Press, New Jersey.
- Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Jakarta. Prenada Media.
- Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Widijantoro, et.al, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Jack Beatson dan Daniel Friedmann (Ed), 1995, *Good Faith and Fault in Contract Law*, Clarendon Press, New York.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Lili Rasjadi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta Press.
- Mukti Fajar ND, 2016, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2017, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016, *Buku I: OJK dan Pengawasan Mikroprudensial (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Reinhard Zimmerman, Simon Whittaker dan Mauro Bussani, 2000, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ridwan Khairandy. 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Pascasarjana UI.
- Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sondang. P. Siagian, 2000, *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung: Jakarta.
- Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasaa.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Sujanto. 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Taryana Soenandar, 2006, *Prinsip-prinsip UNIDROIT, Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Totok Budisantoso dan Nuritmo, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.
- Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju.

JURNAL/ARIKEL/KARYA ILMIAH/LAPORAN

- Agus Sardjono, "Hukum Perjanjian: Antara Norma dan Pelaksanaannya". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 24, No. 3, 1994

- Akmal dan Saputra, “Analisis Tingkat Literasi Keuangan”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Anto Prabowo dan Mugi Harsono, “Fenomena Pengawasan Market Conduct di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 3, 2021.
- Baginda Persaulian, “Regulasi Teknologi Finansial (*Fintech*) di Indonesia”, *Jurnal Fundamental*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2021.
- Bisdan Sigalingging, “Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia”, *Tesis Magister Hukum*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Hendrawan Agusta, “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Bersbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 50, No. 4, 2020.
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, “*Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Nomor 1, Volume 3*, 2018.
- Johanna Jaeger dan Angela Prigozhina, “Market Conduct Supervision in Small Countries: The Case of Armenia”, *Report No. 111266*, World Bank, 2013.
- Johanna Jaeger dan Angela Prigozhina, “Market Conduct Supervision in Small Countries: The Case of Armenia”, *Report No. 111266*, World Bank, 2013.
- Kelvin Leong dan Anna Sung, “Fintech (Financial Technology): What is it and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way?”, *International Journal of Innovation, Management and Technology*, Vol. 9, No. 2, April 2018.
- Nazia Tunisia, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2, Desember 2015.

- Nofie Iman, "Financial Technology dan Lembaga Keuangan", *Makalah*, Disampaikan dalam Seminar Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 22 November 2016.
- Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia", *Pagaruyang Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 24-41.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2017.
- Paul S. Davies, "The Basis of Contractual Duties of Good Faith", *Journal of Commonwealth Law*, Vol. 1, Issue. 1, 2019.
- Paul S. Davies, "The Basis of Contractual Duties of Good Faith", *Journal of Commonwealth Law*, Vol. 1, Issue. 1, 2019
- Pradipto Rimawan, *et. al.* "Alternatif Struktur OJK yang Optimum", *Hasil Kajian Akademik*. Tim Kerjasama Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Agustus 2010.
- Ramona Rupeika-Apoga dan Eleftherios I. Thalassionos, "Ideas for a Regulatory Defenition of Fintech", *International Journal of Economic and Business Administration*, Vol. VIII, Issue 2, 2020.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", *Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No 2, Mei 2018.
- Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution dan Mahmud Siregar, "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Transparency*, Vol. 1, No. 2, 2013.

- Savitri dan Saifudin, “Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada UMKM Mr. Pelangi Semarang)”. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*, Vol. 05, No. 2, 2018.
- Sigalingging, “Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia”, *Tesis Magister Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.
- Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementerian Hukum dan HAM RI*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Susi Mulyanti. “Analisis Yuridis Kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Tesis Magister Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, “Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, 2010.
- Windy Sonya Novita, “Aspek Hukum *Peer to Peer Lending* (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)”, *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Zulkarnain Sitompul, “Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 3, Oktober 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

INTERNET

<https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 5 April 2022 Pukul 17.24 WIB.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Stat.aspx> dikases pada tanggal 5 April 2022, Pukul 13.20 WIB.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-2-Maret-2022.aspx>, dikases pada tanggal 5 April 2022, Pukul 13.12 WIB.